

SKRIPSI

**PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PENGENDALIAN INTERN TERHADAP
NILAI INFORMASI PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Sulawesi Barat)**

MIRNAYANTI



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

SKRIPSI

**PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PENGENDALIAN INTERN TERHADAP
NILAI INFORMASI PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Sulawesi Barat)**

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**MIRNAYANTI
A31108862**



kepada

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

SKRIPSI

**PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PENGENDALIAN INTERN TERHADAP
NILAI INFORMASI PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Sulawesi Barat)**

disusun dan diajukan oleh

**MIRNAYANTI
A31108862**

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 2013

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ratna A. Damayanti, SE, M. Soc, Sc, Ak
NIP. 19670319 199203 2 003

Drs. Agus Bandang, M.Si, Ak
NIP.19620817 199002 1 001

Ketua Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. H. Abdul Hamid Habbe, S.E., M.Si.

NIP 19630515 199203 1 003

ABSTRAK

PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PENGENDALIAN INTERN TERHADAP NILAI INFORMASI PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Sulawesi Barat)

Mirnayanti
Ratna Ayu Damayanti
Agus Bandang

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empirik faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Nilai informasi mengacu pada keandalan dan ketepatanwaktuan, sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi adalah kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern.

Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan kuesioner sebanyak 100 eksemplar, yang dibagikan kepada responden yang merupakan kepala dan staf bagian keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Majene. Data yang dikumpulkan diolah dengan menggunakan SPSS versi 17.0. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi linier berganda.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa: pengendalian intern mempunyai pengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sementara kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh. Pengendalian intern berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan sedangkan baik kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan daerah.

Kata Kunci: Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, Nilai Informasi, Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern

ABSTRACT
**THE INFLUENCE OF HUMAN RESOURCE CAPACITY, INFORMATION
TECHNOLOGY UTILIZATION AND INTERNAL CONTROL TO THE VALUE
OF INFORMATION OF LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL REPORTING**
(Studies in Government Majene regency, West Sulawesi)

Mirnayanti
Ratna Ayu Damayanti
Agus Bandang

The purpose of this study is to empirically examine the factors that influence the value of information of local government financial reporting. Information value refers to reliability and timeliness, whereas factors that influence are human resource capacity, information technology utilization, and internal control.

Data collection is done by giving as many as 100 copies of the questionnaire, which was distributed to respondents who were heads and staff of the financial SKPD Majene district. The data collected were processed using SPSS version 17.0. The statistical method used to test the hypotheses is multiple linear regression.

The test results indicate that hypothesis: internal control has a positive impact on the reliability of financial reporting of local government, while the human resource capacity and information technology utilization have no influence. The internal control positive influence on timeliness of local government financial reporting, while human resource capacity and information technology utilization does not influence the timeliness of local government financial reporting.

Keywords: Local government financial reporting, Information value, Human resource capacity, Information technology utilization, and Accounting intern control.

PRAKATA



Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat, kekuatan, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Sulawesi Barat) “.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, arahan, masukan, dan kerja sama berbagai pihak yang turut membantu selama penyelesaian skripsi ini. Untuk itu, penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua Orang Tua, Bapak Drs. Rustan Hadi, MM dan ibunda Haripah, S.Pd, terima kasih atas semua bantuan, doa, dan pengorbanan yang diberikan kepada ananda selama proses penyusunan skripsi ini, serta adikku tercinta Muh. Fahmi dan Riski Meliani yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Muhammad Ali, S.E., M.S.
3. Bapak Dr. Darwis Said, SE, MSA, Ak selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
4. Ketua Jurusan Akuntansi, Bapak Dr. H. Abdul Hamid Habbe, S.E., M.Si.
5. Ibu Dr. Ratna Ayu Damayanti, S.E., M.Soc. Sc, Ak selaku Pembimbing I dan Bapak Drs. Agus Bandang, M.Si, Ak selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan selama proses penyusunan skripsi ini.

6. Ibu Dra. Haliah, M.Si, Ak selaku penasehat akademik yang telah memberikan masukan dan arahan selama masa perkuliahan.
7. Seluruh Kepala Dinas Pemerintah Kota Majene beserta jajarannya, yang telah memberikan izin dan kemudahan kepada penulis selama melakukan penelitian.
8. Zulkifli, A.Md, untuk cinta, kasih sayang dan perhatiannya yang selama ini diberikan kepadaku.
9. Sahabat-sahabat di kampus merah tercinta, Herlina Samsi, S.E, Ni Made Suarniati, S.E, Kuik Suko, dan Nadilah Sulpa terima kasih atas masa-masa gila dan serunya selama ini, *I love u so much my friend's*.
10. Nur Okviyani, Musdalifah, Reski Fitriah Yahyadin, Lina Indriyati yang masih tetap setia menjadi temanku selama 11 tahun ini dan masih banyak lagi yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu terima kasih atas motivasi dan *supportnya* kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan di Akuntansi 2008, Astry Arianti, Mirnah Amir Makkau, Armaeni, Haspiarti dan Kappyanti, atas bantuan dan informasi terkait penyusunan skripsi, serta semua yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya. Meski demikian, penulis sadar skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu,, kritik dan saran dari pembaca menjadi harapan penulis.

Makassar, Desember 2012

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
ABSTRAK	iv
PRAKATA	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	8
1.4 Tujuan Penelitian	9
1.5 Kegunaan Penelitian.....	9
1.5.1 Kegunaan Teoritis	9
1.5.2 Kegunaan Praktis	9
1.6 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Teori	
2.1.1 <i>Good Corporate Governance Theory</i>	12
2.1.1.1 Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	13
2.1.1.2 Manfaat <i>Good Corporate Governance</i>	14
2.1.2 Laporan Keuangan Pemerintah	15
2.1.3 Nilai Informasi.....	16
2.1.4 Kapasitas Sumber Daya Manusia.....	18
2.1.5 Pemanfaatan Teknologi Informasi	19
2.1.6 Pengendalian Intern	20
2.1.7 Keterandalan (<i>Reliability</i>) dan Ketepatanwaktuan (<i>Timeliness</i>) Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	25
2.2. Penelitian Terdahulu.....	25
2.3 Kerangka Pemikiran.....	28
2.4 Hipotesis Penelitian	29
2.4.1 Hubungan Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah ..	29
2.4.2 Hubungan Pemanfaatan teknologi Informasi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah daerah...	31
2.4.3 Hubungan Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	34
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Rancangan Penelitian.....	36
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	37
3.3 Populasi dan Sampel.....	37

3.4	Jenis dan Sumber Data	38
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.6	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	39
3.6.1	Variabel Penelitian.....	39
3.6.2	Definisi Operasional Variabel	39
3.6.2.1	Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	39
3.6.2.2	Kapasitas Sumber Daya Manusia	40
3.6.2.3	Pemanfaatan Teknologi Informasi	40
3.6.2.4	Pengendalian Intern.....	41
3.7	Analisis Pengujian Data	41
3.7.1	Analisis Deskriptif	41
3.7.2	Uji Kualitas Data.....	42
3.7.2.1	Uji Validitas	42
3.7.2.2	Uji Reliabilitas	42
3.7.3	Uji Asumsi Klasik.....	43
3.7.3.1	Uji Normalitas	43
3.7.3.2	Uji Multikolinearitas.....	43
3.7.3.3	Uji Heterokedasitas.....	44
3.7.3.4	Uji Autokorelasi.....	44
3.7.4	Analisis Regresi Linear Berganda.....	45
3.7.4.1	Koefisien Determinasi	46
3.7.5	Pengujian Hipotesis.....	46
3.7.5.1	Pengujian Simultan (Uji F)	46
3.7.5.2	Pengujian Parsial (Uji t)	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		
4.1	Gambaran Umum Kabupaten Majene.....	48
4.1.1	Visi Pemerintah Kabupaten Majene.....	48
4.1.2	Misi Pemerintah Kabupaten Majene	49
4.1.3	Satuan Kerja Perangkat Daerah.....	49
4.1.4	Struktur Organisasi Pemerintah Kota Majene	51
4.2	Analisis Data.....	52
4.2.1	Analisis Deskriptif	52
4.2.1.1	Karakteristik Responden.....	52
4.2.2	Analisis Jawaban Responden.....	56
4.3	Uji Kualitas Data	64
4.3.1	Uji Validitas	64
4.3.2	Uji Reliabilitas.....	69
4.4	Uji Asumsi Klasik	70
4.4.1	Uji Normalitas	70
4.4.2	Uji Multikolinearitas.....	72
4.4.3	Uji Heterokedasitas	74
4.4.4	Uji Autokorelasi	74
4.5	Pengujian Hipotesis.....	75
4.5.1	Uji Regresi Linear Berganda.....	75
4.5.2	Koefisien Korelasi dan Determinasi	76
4.5.3	Uji F.....	77
4.5.4	Uji t.....	78
4.6	Pembahasan Penelitian	82

4.6.1	Hasil Uji Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	82
4.6.2	Hasil Uji Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	83
4.6.3	Hasil Uji Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	84
4.6.4	Hasil Uji Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	86
4.6.5	Hasil Uji Pengaruh Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	87
4.6.6.	Hasil Uji Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	88
BAB V PENUTUP		
5.1	Kesimpulan.....	90
5.2	Saran – Saran.....	93
5.3	Keterbatasan Penelitian	94
DAFTAR PUSTAKA.....		95
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1 Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Majene.....	50
4.2 Jenis Kelamin Responden.....	53
4.3 Latar Belakang Pendidikan Responden.....	53
4.4 Jabatan Responden.....	55
4.5 Masa Jabatan Responden.....	55
4.6 Deskripsi Jawaban Variabel Kapasitas Sumber Daya Manusia	57
4.7 Deskripsi Jawaban Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi.....	59
4.8 Deskripsi Jawaban Variabel Pengendalian Akuntansi.....	60
4.9 Deskripsi Jawaban Variabel Keterandalan Pelaporan Keuangan.....	62
4.10 Deskripsi Jawaban Variabel Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan	63
4.11 Hasil Uji Validitas Variabel Kapasitas Sumber Daya Manusia.....	65
4.12 Hasil Uji Validitas Pemanfaatan Teknologi Informasi	66
4.13 Hasil Uji Validitas Variabel Pengendalian Intern Akuntansi	66
4.14 Hasil Uji Validitas Variabel Keterandalan Pelaporan Keuangan.....	67
4.15 Hasil Uji Validitas Variabel Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan.....	68
4.16 Hasil Uji Reliabilitas.....	69
4.17 Hasil Uji Normalitas (Y1).....	71
4.18 Hasil Uji Normalitas (Y2).....	72
4.19 Hasil Uji Multikolinearitas (Y1).....	73
4.20 Hasil Uji Multikolinearitas (Y2).....	73
4.21 Hasil Uji t (Y1).....	79
4.22 Hasil Uji t (Y2).....	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran.....	28
4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Kota Majene.....	51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman	
1. Biodata.....	99	
2. Peta Teori.....	100	
3. Kuesioner Penelitian.....	107	
4. Hasil Jawaban Responden.....	113	
5. Statistik Deskriptif.....	120	
6. Frekuensi Jawaban Respond.....	122	
7. Uji Kualitas Data.....	130	
8. Uji Asumsi Klasik.....	131	
9. Uji Regresi Linear Berganda.....	135	

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : MIRNAYANTI
NIM : A31108862
Jurusan/Program Studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PENGENDALIAN INTERN TERHADAP NILAI INFORMASI PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Sulawesi Barat)

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 80).

Makassar, Desember 2012

Yang membuat pernyataan,

MIRNAYANTI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam waktu yang relatif singkat akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Saat ini terdapat perhatian yang lebih besar terhadap praktek akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah, perusahaan milik negara/daerah, dan berbagai organisasi publik lainnya dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Terdapat tuntutan yang lebih besar dari masyarakat untuk dilakukan transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik (Mardiasmo, 2002:1).

Fenomena yang telah terjadi dalam perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik seperti pemerintah pusat dan daerah, unit-unit kerja pemerintah, departemen dan lembaga-lembaga negara. Tuntutan akuntabilitas sektor publik terkait dengan perlunya dilakukan transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik (Mardiasmo, 2002:20). Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk menerima pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002:20).

Akuntabilitas publik merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan karena adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya. Pelaporan

keuangan bertujuan untuk memberikan informasi terhadap pemakai. Informasi tersebut dianggap bernilai jika dapat dipahami dan digunakan. Unsur-unsur pembentuk laporan yang bernilai menurut Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (PP No. 24 Tahun 2005) terdiri dari: (a) relevan, (b) andal, (c) dapat di bandingkan dan (d) dapat dipahami. Laporan keuangan disajikan kepada pemangku kepentingan bukan untuk mempersulit dan membingungkan pembacanya tetapi justru untuk membantu mereka dalam pengambilan keputusan sosial, politik, dan ekonomi. Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah perlu disampaikan secara tepat waktu dan disusun mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan pemerintah disajikan sesuai dengan SAP yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Laporan Arus Kas (LAK) disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Teori yang dikemukakan oleh Wahyudi (2010) tentang kapasitas sumber daya manusia menyatakan bahwa:

Sistem akuntansi sebagai suatu sistem informasi membutuhkan manusia untuk menjalankan sistem yang ada, dengan adanya sumber daya manusia yang bekerja sesuai dengan kapasitas yang dimiliki, diharapkan laporan keuangan yang dihasilkan dapat diandalkan yaitu bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

Sumber daya manusia yang bekerja sesuai dengan kapasitasnya juga dapat menghemat waktu pembuatan laporan keuangan. Hal itu disebabkan karena sumber daya manusia tersebut telah mengetahui dan memahami apa yang akan dikerjakan dengan baik sehingga laporan keuangan bisa disajikan tepat waktu.

Saat ini secara bertahap pemerintah akan berpindah dari sistem akuntansi *single entry* ke *double entry* karena penggunaan *single entry* tidak dapat memberikan informasi yang komprehensif dan mencerminkan kinerja yang sesungguhnya. Selain sistem akuntansi, basis akuntansi yang diterapkan pemerintah pun kini mengalami perubahan dari berbasis kas (*cash basis*) menjadi berbasis akrual (*accrual basis*). Permasalahan penerapan basis akuntansi bukan hanya sekedar teknik akuntansi semata seperti mencatat transaksi maupun menyajikan laporan keuangan, akan tetapi yang lebih penting adalah bagaimana menentukan kebijakan akuntansi yang akan digunakan, bagaimana perlakuan akuntansi untuk setiap transaksi yang terjadi, dan bagaimana menganalisis sistem akuntansi yang ada. Kebijakan-kebijakan ini tidak dapat dilakukan oleh pegawai yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi, oleh karena itu penempatan pegawai sebagai sumber daya manusia harus sesuai dengan bidang ilmu yang dikuasai (Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik, 2006 dalam Indriasari dan Ertambang, 2008).

Penelitian mengenai sumber daya manusia yang ada di instansi pemerintah pernah dilakukan. Penelitian Dinata (2004) dalam Indriasari dan Ertambang (2008) menemukan bukti empiris bahwa secara garis besar sumber daya manusia yang ada di instansi pemerintahan Kota Palembang belum sepenuhnya dinyatakan siap atas berlakunya sistem akuntansi keuangan daerah yang berdasarkan keputusan menteri dalam negeri nomor 29 tahun 2002. Penelitian Alimbudiono dan Fidelis (2004) dalam Indriasari dan Ertambang (2008) memberikan temuan empiris bahwa pegawai berlatar pendidikan akuntansi di sub bagian akuntansi Pemerintah XYZ masih minim, *job description*-nya belum jelas, dan pelatihan-pelatihan untuk menjamin fungsi akuntansi berjalan dengan baik belum dilaksanakan.

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia yang ada di instansi pemerintahan masih belum memadai. Apabila sumber daya manusia yang ada di organisasi pemerintahan masih minim yang mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi, maka ini akan berpengaruh terhadap laporan keuangan pemerintah yang akan dibuat. Dengan minimnya kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki akan memiliki pengaruh terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah (Indriasari dan Ertambang, 2008).

Selain kapasitas sumber daya manusia, hal yang mempengaruhi keterandalan dan ketepatanwaktuan laporan keuangan pemerintah adalah pemanfaatan teknologi informasi (Andriani, 2010). Teknologi informasi kini berkembang dengan pesat sehingga dengan teknologi informasi ini diharapkan pemerintah dapat meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah serta dapat menyampaikan informasi keuangan daerah kepada publik. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah.

Manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi adalah kecepatan pemrosesan data atau transaksi dan penyiapan laporan, dapat menyimpan data dalam jumlah yang besar, meminimalisir terjadinya kesalahan, dan biaya pemrosesan lebih rendah. Akan tetapi, jika teknologi informasi tidak dapat dimanfaatkan secara optimal maka implementasi teknologi informasi akan menjadi mahal (Indriasari dan Ertambang, 2008). Hal ini terkait dengan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan, kondisi sumber daya manusia yang ada tidak mempunyai cukup pengetahuan untuk memanfaatkan teknologi informasi tersebut, dan kendala lainnya adalah keterbatasan dana untuk mengimplementasikan teknologi informasi (Afrianti, 2011). Kendala-

kendala ini menjadi faktor pemanfaatan teknologi informasi di instansi pemerintah belum optimal. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi ini mungkin akan berpengaruh terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah (Indriasari dan Ertambang, 2008).

Hasil penelitian yang ditemukan oleh Zetra (2009) menunjukkan bahwa kesiapan sarana dan prasarana pendukung seperti komputer, baik *hardware* maupun *software*, bagi aparatur di daerah dalam menyampaikan LKPD masih kurang. Banyak SKPD yang hanya memiliki satu unit komputer untuk semua urusan. Padahal untuk dapat menjalankan sistem informasi keuangan secara efektif, idealnya setiap SKPD memiliki komputer khusus untuk penatausahaan keuangan. Kendala ini yang mungkin menyebabkan pemanfaatan teknologi informasi di instansi pemerintah belum dilaksanakan secara optimal, sehingga hal tersebut mungkin memiliki pengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Selain kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi, hal lain yang mempengaruhi keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah adalah pengendalian intern akuntansi (Indriasari dan Ertambang, 2008). Pengendalian intern ini menjadi sangat penting karena sistem akuntansi sebagai sistem informasi merupakan subjek terjadinya kesalahan baik yang disengaja mau pun tidak disengaja. Oleh karena itu, untuk menyakinkan para *stakeholder* maupun publik tentang keakuratan laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah dibutuhkan sistem pengendalian intern yang optimal. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dinyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Oleh karena itu,

sistem pengendalian intern dalam laporan keuangan pemerintah daerah menjadi suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan, sehingga dapat mencapai efisiensi, efektivitas, dan mencegah terjadinya kerugian keuangan negara demi kepentingan masyarakat dan daerah (Afrianti, 2011).

Temuan pemeriksaan BPK dalam semester II tahun 2011 menyatakan bahwa dari 516 LKPD, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian hanya 34 LKPD saja. Hasil pemeriksaan BPK yang dilaporkan IHPS II tahun 2011 juga mengungkapkan kerugian negara pada tahun 2010 sebesar Rp 20,25 triliun akibat kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan daerah dalam menjalankan peraturan perundang-undangan (BPK RI). Hasil evaluasi atas 516 LKPD, terdapat 4.178 kasus kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) yang meliputi kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan. Ini menunjukkan bahwa, sistem pengendalian intern pada instansi pemerintah belum dilaksanakan secara optimal, sehingga hal tersebut mungkin memiliki pengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah.

Penelitian mengenai pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah sudah pernah dilakukan, diantaranya dilakukan oleh Indriasari dan Ertambang (2008) dan Mustafa dkk. (2010), yang menemukan bukti empiris bahwa kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Kemudian teknologi informasi dan kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian Indriasari dan Ertambang (2008) dan Mustafa dkk. (2010), berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Andriani (2010) yang

meneliti pengaruh kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian Andriani (2010) adalah kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Kemudian teknologi informasi berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah, namun kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh. Winidyaningrum dan Rahmawati (2010), juga menemukan hasil penelitian yang sama dengan yang dilakukan oleh Andriani (2010). Akan tetapi, dalam penelitiannya Winidyaningrum dan Rahmawati menambahkan pengendalian intern akuntansi sebagai variabel *intervening*.

Afrianti (2011) juga melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitiannya menemukan bukti empiris bahwa pengendalian intern akuntansi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, namun kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh. Pemanfaatan teknologi informasi dan kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan.

Perbedaan hasil beberapa penelitian yang disebutkan di atas membuat peneliti tertarik untuk menganalisis lebih lanjut mengenai **“Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Masih banyaknya pegawai pada instansi pemerintah sebagai sumber daya manusia yang tidak di tempatkan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki, khususnya pada bagian pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah.
- b. Hasil penelitian yang ditemukan oleh Zetra (2009) menunjukkan bahwa masih banyaknya SKPD yang hanya memiliki satu unit komputer untuk semua urusan. Padahal idealnya setiap SKPD memiliki komputer khusus untuk penatausahaan keuangan khususnya dalam pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah.
- c. Temuan pemeriksaan BPK dalam semester II tahun 2011 menyatakan bahwa dari 516 LKPD, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian hanya 34 LKPD saja. Hasil evaluasi atas 516 LKPD, terdapat 4.178 kasus kelemahan sistem pengendalian intern (SPI). Hal ini menandakan bahwa masih kurangnya sistem pengendalian intern pada pelaporan keuangan pemerintah keuangan daerah.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, pertanyaan penelitian yang dapat diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Apakah kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah?
- b. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah?
- c. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan hasil akhir yang ingin dicapai seperti yang telah direncanakan, tanpa adanya tujuan yang jelas akan mengakibatkan suatu kegiatan kurang terarah. Sesuai dengan penjelasan di atas tujuan penelitian ini adalah:

- a. untuk mengetahui pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.
- b. untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.
- c. untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1.5.1 Kegunaan teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini pengembangan keilmuan di bidang akuntansi dapat terus meningkat, terutama dalam membuktikan teori-teori yang melandasi penelitian, yaitu teori agensi yang menjadi landasan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan menciptakan laporan keuangan pemerintah yang andal dan tepat waktu.

1.5.2 Kegunaan praktis

a. Bagi pemerintah

Diharapkan dengan adanya penelitian ini pemerintah dapat menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku

tanpa mengurangi nilai informasi yang ada pada laporan keuangan yaitu keterandalan dan ketepatanwaktuan demi tercapainya tata kelola yang baik (*good governance*). Selain itu, peneliti juga mengharapkan pemerintah juga bisa segera atau terus menerbitkan laporan keuangan secara terbuka kepada masyarakat.

b. Bagi peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan wawasan dan pemahaman yang mendalam berkaitan dengan laporan keuangan sektor publik khususnya laporan keuangan pemerintah dan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

c. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan suatu referensi yang berguna bagi lembaga pendidikan tempat penulis belajar yaitu Universitas Hasanuddin.

1.6. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara terperinci dalam lima bab dengan urutan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Berisi landasan teori yang mendasari penelitian, membahas hasil-hasil penelitian terdahulu yang sejenis, dan kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antarvariabel penelitian, serta hipotesis penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Menguraikan deskripsi dari variabel-variabel penelitian, definisi operasional, penentuan sampel penelitian, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data penelitian, serta metode analisis data dan alat analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasannya.

BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Good Corporate Governance Theory*

Usaha untuk melembagakan *corporate governance* pertama kalinya dilakukan oleh *Bank of England* dan *London Stock Exchange* pada tahun 1992 dengan membentuk *Cadbury Committee* (Komite Cadbury). *Cadbury Committee* (Komite Cadbury) bertugas menyusun *corporate governance code* yang menjadi acuan utama di banyak negara.

Komite Cadbury mendefinisikan *corporate governance* (Surya dan Yustiavandana, 2008:24) sebagai :

Sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada *stakeholders*. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham, dan sebagainya.

Dari definisi yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* adalah suatu sistem yang dibangun untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan atau organisasi sehingga tercipta tata hubungan yang baik, adil dan transparan di antara berbagai pihak yang terkait dan memiliki kepentingan dalam perusahaan. Pihak-pihak terkait yang dimaksud terdiri atas pihak internal yang bertugas mengelola perusahaan atau organisasi dan pihak eksternal yang meliputi pemegang saham, kreditur dan lain-lain.

2.1.1.1 Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) secara umum adalah sebagai berikut (Sutedi, 2011:68):

- a. *Fairness* (keadilan), yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. *Fairness* menjamin perlindungan hak para pemegang saham dan menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor.
- b. *Transparency* (transparansi), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan, mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas dan dapat diperbandingkan, yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan.
- c. *Accountability* (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Akuntabilitas menjelaskan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh Dewan Komisaris.
- d. *Responsibility* (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan atau organisasi terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. *Responsibility* memastikan dipenuhinya peraturan-peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cermin dipatuhinya nilai sosial.

2.1.1.2 Manfaat *Good Corporate Governance*

Beberapa manfaat penerapan *corporate governance* (Maksum, 2005) adalah :

- a. Dengan *good corporate governance* proses pengambilan keputusan akan berlangsung secara lebih baik sehingga akan menghasilkan keputusan yang optimal, dapat meningkatkan efisiensi serta terciptanya budaya kerja yang lebih sehat. Ketiga hal ini jelas akan sangat berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, sehingga kinerja perusahaan atau organisasi akan mengalami peningkatan.
- b. *Good corporate governance* akan memungkinkan dihindarinya atau sekurang-kurangnya dapat diminimalkannya tindakan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan organisasi. Hal ini tentu akan menekan kemungkinan kerugian bagi organisasi maupun pihak berkepentingan lainnya sebagai akibat tindakan tersebut.
- c. Dengan baiknya pelaksanaan *corporate governance*, maka tingkat kepercayaan para *stakeholders* kepada organisasi akan meningkat sehingga citra positif organisasi akan naik.
- d. Penerapan *corporate governance* yang konsisten juga akan meningkatkan kualitas laporan keuangan organisasi. Manajemen akan cenderung untuk tidak melakukan rekayasa terhadap laporan keuangan, karena adanya kewajiban untuk mematuhi berbagai aturan dan prinsip akuntansi yang berlaku dan penyajian informasi yang transparan.

Berbagai penjelasan mengenai *Good Corporate Governance (GCG)* di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa GCG merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan umum dari instansi secara efektif dan efisien, dengan tetap memperhatikan kepentingan para *stakeholder*. GCG memiliki empat elemen yang

dapat menjalankan peran organisasi dalam mencapai tujuannya. Keempat elemen tersebut adalah transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan keadilan. Sejauh ini instansi swasta maupun pemerintah berlomba-lomba untuk menciptakan suasana GCG di dalam instansi dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik.

2.1.2 Laporan Keuangan Pemerintah

Laporan keuangan pemerintah merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan aplikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi berupa laporan keuangan. Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih mendalam.

Bagi organisasi pemerintahan, tujuan umum akuntansi dan laporan keuangan menurut Mardiasmo (2002: 162) adalah: (a) untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta berbagai bukti pertanggungjawaban (*accountability*) dan pengelolaan (*stewardship*), (b) untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja material dan organisasional.

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan (Afrianti, 2011):

a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan, sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d) Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

2.1.3 Nilai Informasi

Manfaat dan tujuan laporan keuangan pemerintah dapat dicapai apabila informasi yang disajikan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut (Indriasari dan Ertambang, 2008). Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi mempunyai nilai.

Agar informasi tersebut dapat mendukung dalam pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai, maka informasi akuntansi harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 antara lain :

- a. Relevan, yaitu informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur berikut:
 - 1) Manfaat umpan balik (*feedback value*). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
 - 2) Manfaat prediktif (*predictive value*). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
 - 3) Tepat waktu (*timeliness*). Informasi yang disajikan secara tepat waktu dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
 - 4) Lengkap, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

- b. Andal, yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut:
- 1) Penyajian jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
 - 2) Dapat diverifikasi (*verifiability*). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
 - 3) Netralitas, yaitu informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
- c. Dapat dibandingkan
- Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
- d. Dapat dipahami
- Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

2.1.4 Kapasitas Sumber Daya Manusia

Menurut Indriasari dan Ertambang (2008), kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas

harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*). Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu, harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi (Afrianti, 2011).

Menurut Tjiptoherijanto (2001) dalam Indriasari dan Ertambang (2008), untuk menilai kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kompetensi sumber daya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dari atau tertuang dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumber daya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas (Indriasari dan Ertambang, 2008).

2.1.5 Pemanfaatan Teknologi Infomasi

Teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang dengan pesat membawa dunia memasuki era baru menuntut informasi yang lebih cepat. Banyak perubahan yang terjadi pada lingkungan bisnis maupun pemerintahan seperti perubahan teknologi produksi, teknologi informasi dan struktur organisasi, yang mendorong organisasi untuk terus berupaya meningkatkan kinerja organisasi dalam mencapai tujuannya (Supada, 2010).

Teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), database, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan

jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson *et al.*, 2000 dalam Indriasari dan Ertambang, 2008). Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik; dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat (Hamzah, 2009 dalam Winidyaningrum dan Rahmawati, 2010).

2.1.6 Pengendalian Intern

Definisi pengendalian intern menurut COSO adalah suatu proses, yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil lainnya dari sebuah entitas, yang dirancang untuk memberikan keyakinan/jaminan yang wajar dengan pencapaian tujuan dalam kategori yaitu : (a) efektivitas dan efisiensi operasi, (b) keandalan laporan keuangan, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Moeller, 2009: 32).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan adopsi dari COSO dengan dilakukannya penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pemerintah Republik Indonesia. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 definisi sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Afrianti (2011) pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi

informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan tertentu. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*). Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. Pada tingkatan organisasi, tujuan pengendalian intern berkaitan dengan keandalan laporan keuangan, umpan balik yang tepat waktu terhadap pencapaian tujuan-tujuan operasional dan strategis, serta kepatuhan pada hukum dan regulasi.

Pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metoda, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keterandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan dipatuhinya kebijakan pimpinan. Menurut tujuannya, pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua (Bastian dan Gatot, 2002: 204), yaitu:

a. Pengendalian intern akuntansi (*accounting internal control*)

Dibuat untuk mencegah terjadinya inefisiensi yang tujuannya adalah menjaga kekayaan organisasi dan memeriksa keakuratan data akuntansi. Sebagai contoh, adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab antar unit organisasi.

b. Pengendalian intern administratif (*internal administrative control*).

Dibuat untuk mendorong dilakukannya efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Contohnya adalah pemeriksaan laporan untuk mencari penyimpangan yang ada, untuk kemudian diambil tindakan.

Menurut Wilkinson *et al.* (2000) dalam Indriasari dan Ertambang (2008), sub komponen dari aktivitas pengendalian yang berhubungan dengan pelaporan keuangan adalah (a) perancangan yang memadai dan penggunaan dokumen-

dokumen dan catatan-catatan bernomor, (b) pemisahan tugas, (c) otorisasi yang memadai atas transaksi-transaksi, (d) pemeriksaan independen atas kinerja, dan (e) penilaian yang tepat atas jumlah yang dicatat.

COSO mengidentifikasi sistem pengendalian internal yang efektif meliputi lima komponen yang saling berhubungan untuk mendukung pencapaian tujuan entitas, yaitu (Moeller, 2009: 33):

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah tindakan, kebijakan, prosedur yang merefleksikan seluruh sikap manajemen, dewan komisaris, dan pemilik entitas tentang pentingnya pengendalian dalam suatu entitas yang mencakup: (a) integritas dan nilai etika (*integrity and ethical values*), (b) komitmen terhadap kompetensi (*commitment to competence*), (c) dewan komisaris atau komite audit (*board of directors or audit committee*), (d) filosofi dan gaya operasi manajemen (*manajemen's philosophy and operating style*), (e) struktur organisasi (*organizational structure*), (f) pemberian otoritas dan tanggung jawab (*assignment of authority and responsibility*), (g) kebijakan dan praktik sumber daya manusia (*human resource policies and practices*).

b. Penilaian Resiko (*risk assessment*)

Penilaian resiko dalam sistem pengendalian intern adalah usaha manajemen untuk mengidentifikasi dan menganalisis resiko yang relevan dalam menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

c. Aktivitas pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibangun oleh manajemen untuk mencapai tujuan laporan keuangan yang objektif. Aktivitas pengendalian dapat digolongkan dalam pemisahan tugas yang memadai, otorisasi yang tepat atas transaksi dan aktivitas, dokumentasi dan catatan

yang cukup, pengawasan aset antara catatan dan fisik, serta pemeriksaan independen atas kinerja.

d. Informasi dan Komunikasi (*information and communication*)

Informasi dan komunikasi dalam pengendalian adalah metode yang dipergunakan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, mengklasifikasi, mencatat dan melaporkan semua transaksi entitas, serta untuk memelihara akuntabilitas yang berhubungan dengan aset. Transaksi-transaksi harus memuaskan dalam hal eksistensi, kelengkapan, ketepatan, klasifikasi, tepat waktu, serta dalam posting dan mengikhtisarkan.

e. Pemantauan (*monitoring*)

Pemantauan kegiatan pengendalian intern secara periodik harus dipantau oleh manajemen. Pemantauan meliputi penilaian atas kualitas kerja pengendalian intern untuk menentukan apakah operasi pengendalian memerlukan modifikasi atau perbaikan.

Berdasarkan PP. 60 tahun 2008 yang dibuat berdasarkan adopsi dari COSO tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menyatakan bahwa unsur-unsur pembentuk SPIP antara lain:

a. Lingkungan pengendalian;

Indikator lingkungan pengendalian ini memiliki makna bahwa pimpinan dan staf instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya, melalui; penegakan integritas dan nilai etika; komitmen terhadap kompetensi; dan kepemimpinan yang kondusif. Penegakkan integritas dan nilai etika dilakukan dengan cara: menyusun dan menerapkan aturan perilaku; memberikan keteladanan; dan menegakkan tindakan disiplin.

b. Penilaian resiko

Indikator penilaian resiko ini memiliki makna bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian resiko, melalui identifikasi resiko dan analisis resiko yang mungkin bisa terjadi. Penilaian resiko oleh pimpinan instansi pemerintah dengan cara menetapkan: tujuan instansi dan tujuan pada tingkatan kegiatan.

c. Kegiatan pengendalian

Indikator kegiatan pengendalian ini memiliki makna bahwa pimpinan beserta staf instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

d. Informasi dan komunikasi

Indikator informasi dan komunikasi ini memiliki makna bahwa pimpinan dan staf instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Pimpinan dan staf instansi pemerintah wajib menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi.

e. Pemantauan pengendalian intern.

Indikator pemantauan pengendalian intern ini memiliki makna bahwa sistem pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya.

2.1.7 Keterandalan (*Reliability*) dan Ketepatanwaktuan (*Timeliness*) Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Keterandalan adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau *valid* (Afrianti, 2011). Informasi yang memiliki kualitas andal adalah apabila informasi tersebut bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan (Afrianti, 2011).

Ketepatanwaktuan merupakan penyajian informasi yang sesuai dengan standar waktu yang ditetapkan. Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik, serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut (Afrianti, 2011). Kegunaan laporan keuangan akan berkurang apabila laporan tidak tersedia bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan. Dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 menyatakan bahwa batas waktu penyampaian laporan keuangan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Kendala ketetapan waktu penyajian laporan keuangan terkait dengan lama waktu yang dibutuhkan oleh organisasi untuk menghasilkan laporan keuangan. Semakin cepat waktu penyajian laporan keuangan, maka semakin baik untuk pengambilan keputusan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah sudah pernah dilakukan, diantaranya dilakukan oleh Indriasari dan Ertambang (2008) yang meneliti tentang pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi

informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah dan Mustafa dkk. (2010) yang meneliti tentang analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pada SKPD pemerintah daerah Kota Kendari. Indriasari dan Ertambang (2008) dan Mustafa dkk. (2010), menemukan bukti empiris bahwa kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh. Kemudian teknologi informasi dan kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian Indriasari dan Ertambang (2008) dan Mustafa dkk. (2010), berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Andriani (2010) yang meneliti pengaruh kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah, menemukan bukti empiris bahwa kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Kemudian teknologi informasi berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah, namun kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh. Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) yang meneliti tentang pengaruh sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening pengendalian intern akuntansi, juga menemukan hasil penelitian yang sama dengan yang dilakukan oleh Andriani (2010). Akan tetapi, dalam penelitiannya Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) menambahkan pengendalian intern akuntansi sebagai variabel intervening.

Wahyudi (2011) melakukan penelitian yang merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Winidyaningrum dan Rahmawati (2010), akan tetapi penelitiannya dilakukan pada pemerintah Kabupaten Lombok Timur sedangkan Winidyaningrum dan Rahmawati melakukan penelitian di Pemerintah Daerah Subosukawonosraten. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah melalui pengendalian intern akuntansi. Pemanfaatan teknologi informasi dan sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian Wahyudi (2010) didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Risa (2008) dalam Sutaryo (2011) yang melakukan penelitian tentang sistem pengendalian internal pemerintah daerah, penggunaan *software* akuntansi dan nilai laporan keuangan pemerintah. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap nilai laporan keuangan pemerintah daerah.

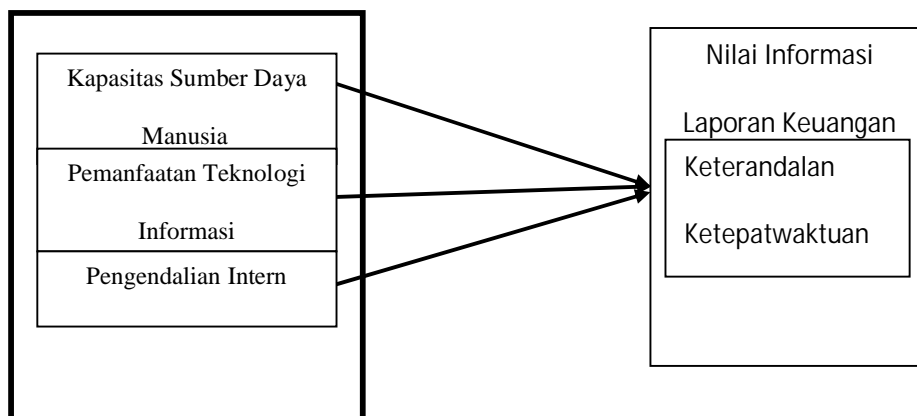
Prpto (2010) melakukan penelitian tentang pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan di pemerintah Kabupaten Sragen. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah, akan tetapi pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Afrianti (2011) juga melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitiannya menemukan bukti empiris bahwa pengendalian intern akuntansi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah,

namun kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh. Kemudian kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah, namun pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan rumusan masalah penelitian, maka pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern terhadap nilai informasi (keterandalan dan ketepatanwaktuan) pelaporan keuangan pemerintah daerah dapat digambarkan pada kerangka pemikiran berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Hubungan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*).

Penelitian mengenai kesiapan sumber daya manusia sub bagian akuntansi pemerintah daerah dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban keuangan daerah pernah dilakukan oleh Alimbudiono dan Fidelis (2004) dalam Indriasari dan Ertambang (2008). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa masih minimnya pegawai berlatar pendidikan akuntansi, belum jelasnya *job description*, dan belum dilaksanakannya pelatihan-pelatihan untuk menjamin fungsi akuntansi berjalan dengan baik pada Pemerintah XYZ.

Penelitian yang dilakukan oleh Andriani (2010), Winidyaningrum dan Rahmawati (2010), Wahyudi (2010) dan Risa (2008) dalam Sutaryo (2010) menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Indriasari dan Ertambang (2008), Mustafa dkk. (2010), dan Afrianti (2011) menunjukkan hasil bahwa kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah.

Sumber daya manusia yang bekerja sesuai dengan kapasitas yang dimiliki akan berdampak pada pelaksanaan fungsi akuntansi. Pegawai yang memiliki pemahaman yang rendah akan berdampak pada penyajian laporan keuangan. Oleh karena itu, dibutuhkan kapasitas sumber daya manusia yang baik agar penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan pemerintah akurat dan

andal. Berdasarkan uraian tersebut peneliti menduga terdapat hubungan positif antara kapasitas sumber daya manusia terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah, sehingga peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut.

H_{1a} : Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Rendahnya pemahaman pegawai terhadap tugas dan fungsinya serta hambatan di dalam pengolahan data juga dapat berdampak pada keterlambatan penyelesaian tugas yang harus diselesaikan, salah satunya adalah penyajian laporan keuangan. Keterlambatan penyajian laporan keuangan berarti bahwa laporan keuangan belum/tidak memenuhi nilai informasi yang disyaratkan, yaitu ketepatanwaktuan.

Penelitian yang dilakukan oleh Andriani (2010), dan Winidyaningrum dan Rahmawati (2010), menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Indriasari dan Ertambang (2008), Mustafa dkk. (2010), Afrianti (2011), dan Wahyudi (2010) menunjukkan hasil bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah.

Sumber daya manusia yang bekerja sesuai dengan kapasitas yang dimiliki akan berdampak pada pelaksanaan fungsi akuntansi. Pegawai yang memiliki pemahaman yang rendah akan berdampak pada penyajian laporan keuangan. Keterlambatan penyajian laporan keuangan berarti bahwa laporan keuangan belum atau tidak memenuhi salah satu nilai informasi yang disyaratkan, yaitu ketepatanwaktuan. Oleh karena itu, dibutuhkan kapasitas sumber daya manusia yang baik agar penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan pemerintah andal dan tepat waktu. Berdasarkan uraian tersebut peneliti

menduga terdapat hubungan positif antara kapasitas sumber daya manusia terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah, sehingga peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut.

H_{1b} : Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

2.4.2 Hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah

Perkembangan teknologi informasi yang ada sekarang ini sangat berkembang pesat. Perkembangan teknologi informasi kini tidak hanya untuk organisasi bisnis semata, akan tetapi teknologi informasi untuk organisasi sektor publik juga mengalami perkembangan yang signifikan. Dalam membuat laporan keuangan pemerintah, kini tidak dilakukan secara manual, akan tetapi menggunakan aplikasi yang dirancang secara khusus untuk membuat laporan keuangan pemerintah.

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada publik. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja.

Penelitian yang berhubungan dengan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi informasi pada organisasi sektor publik sudah pernah dilakukan. Uraian dan temuan empiris mengenai teknologi informasi menunjukkan bahwa pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi informasi (komputer dan jaringan) akan memberikan banyak keunggulan baik dari sisi keakuratan/ketepatan hasil operasi maupun predikatnya sebagai mesin multiguna, *multiprocessing* (Indriasari dan Ertambang, 2008). Pemanfaatan teknologi informasi juga akan mengurangi kesalahan yang terjadi.

Penelitian yang dilakukan oleh Indriasari dan Ertambang (2008), Winidyaningrum dan Rahmawati (2010), Andriani (2010), dan Mustafa dkk. (2010) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Afrianti (2011) dan Prpto (2010) menunjukkan hasil bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah.

Pemanfaatan teknologi informasi yang baik akan berdampak pada cara kerja pemerintah. Pemanfaatan teknologi informasi akan meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan dari proses penyusunan pelaporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi yang baik, diharapkan dapat menghasilkan pelaporan keuangan yang handal, sehingga keterandalan pelaporan keuangan juga dapat meningkat. Berdasarkan uraian tersebut peneliti menduga terdapat hubungan positif antara pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan pelaporan keuangan, sehingga peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut.

H_{2a} : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah

Sistem akuntansi di pemerintah daerah sudah pasti memiliki transaksi yang kompleks dan besar volumenya. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan, sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi yaitu ketepatanwaktuan.

Penelitian yang dilakukan oleh Indriasari dan Ertambang (2008), Andriani (2010), Mustafa dkk. (2010), Winidyaningrum dan Rahmawati (2010), dan Afrianti (2011) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah, sedangkan Prpto (2010) menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam organisasi diharapkan mampu meningkatkan kinerja organisasi. Salah satu manfaat utama dari penggunaan teknologi informasi dalam organisasi adalah pekerjaan yang dapat dilakukan dengan lebih cepat. Berkaitan dengan aspek pencatatan dan pelaporan keuangan pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi dalam organisasi diharapkan membuat organisasi dapat melakukan pencatatan transaksi dengan cepat serta dapat menghasilkan laporan yang lebih akurat. Dengan demikian, Informasi yang disajikan tepat waktu diharapkan dapat memberikan manfaat lebih kepada para pengguna pelaporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut peneliti menduga terdapat hubungan positif antara pemanfaatan teknologi informasi terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan, sehingga peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut.

H_{2b}: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

2.4.3 Hubungan Pengendalian Intern dan Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah

Masalah-masalah yang ditemukan oleh pihak BPK dalam laporan keuangan pemerintah seperti ketidakpatuhan, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan dan temuan penyimpangan administrasi dan kelemahan sistem pengendalian intern menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah belum memenuhi karakteristik/nilai informasi yang disyaratkan, yaitu keandalan. Temuan pemeriksaan BPK dalam semester II tahun 2011 meliputi 12.612 kasus senilai Rp. 20,25 triliun diantaranya kelemahan sistem pengendalian intern sebanyak 4.178 kasus. Oleh karena itu, dengan melihat temuan BPK tentang kelemahan sistem pengendalian intern sebanyak 4.178 kasus, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan pemerintah memerlukan perbaikan pengendalian intern dalam hal keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Indriasari dan Ertambang (2008), Winidyaningrum dan Rahmawati (2010), Mustafa dkk. (2010), Prpto (2010) dan Afrianti (2011) menunjukkan bahwa pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah. Dari temuan-temuan tersebut, diduga terdapat hubungan positif antara pengendalian intern dengan keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sehingga peneliti merumuskan hipotesis :

H_{3a}: Pengendalian intern berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Ketepatanwaktuan dapat dipengaruhi berbagai macam aspek, salah satunya kemampuan sistem akuntansi (Salamun, 2007 dalam Prpto, 2010). Sistem akuntansi yang baik memiliki pengendalian intern yang baik pula.

Pengendalian intern diharapkan mampu mencegah terjadinya kesalahan dalam proses akuntansi serta dapat memberikan perlindungan bagi data organisasi dari ancaman sabotase sistem. Pengendalian intern disusun agar pelaporan keuangan dapat memenuhi asas ketertiban. Perwujudan dari asas ketertiban tersebut adalah penyampaian pelaporan keuangan secara tepat waktu. Penelitian yang dilakukan oleh Prpto (2010) menunjukkan bahwa pengendalian intern akuntansi berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti mengajukan hipotesis:

H_{3b}: Pengendalian intern berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.